

Pengembangan Kesadaran Kritis di Pesantren dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0

Ahmad Taufiq¹

¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Jl. Sunan Ampel No. 7, Kota Kediri, Jawa Timur, 64127, Indonesia.

Email: taufiqahmad34@yahoo.co.id

Abstrak: Artikel ini membahas tentang kesadaran kritis di Pesantren dalam menghadapi tantangan global. Revolusi industri 4.0 dan revolusi masyarakat 5.0 menimbulkan disrupsi dalam berbagai kehidupan masyarakat. Secara umum disrupsi mengganggu dan menimbulkan kekacauan, tetapi dapat juga memberikan rangsangan sekaligus tantangan untuk dikelola secara positif jika dihadapi secara kritis, kreatif dan inovatif, tergantung pada kesadaran masyarakat terhadapnya. Sebagai lembaga pendidikan dan sosial, pesantren telah memiliki dasar-dasar kesadaran kritis sejak kelahiran, pertumbuhan, sampai perkembangannya saat ini, sehingga selalu mampu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah. Dalam rangka menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan dampak yang ditimbulkannya, pengembangan kesadaran kritis di pesantren menjadi suatu keniscayaan. Kesadaran ini membuat pesantren selalu mampu bersikap kritis, kreatif dan inovatif dengan cara mengidentifikasi, menganalisa, dan mentransformasika realitas sosial budaya menuju kondisi yang lebih baik.

Kata Kunci: pesantren klasik dan modern,
pendidikan Islam, moderasi agama.

1. Pendahuluan

Perkembangan pesantren selalu terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang melingkupinya, baik pada tataran lokal, regional, nasional, maupun global. Masyarakat dunia saat ini berada pada tahap perkembangan 5.0. Masyarakat 1.0 ditandai dengan kegiatan berburu sebagai mata pencahariannya, masyarakat 2.0 hidup dengan mata pencaharian di bidang pertanian, masyarakat 3.0 berada pada era industri, masyarakat 4.0 ditandai dengan derasnya arus informasi dan kuatnya pengaruh ilmu pengetahuan, sedangkan masyarakat 5.0 berada pada kondisi masyarakat imajinasi (*imagination society*) [1], ditandai dengan semakin maraknya kecerdasan buatan yang menguasai aktifitas manusia. Masyarakat jenis yang kelima ini (*society 5.0*) beriringan dengan datangnya era revolusi industri 4.0.

Revolusi industri 4.0 memiliki karakter berbeda dengan beberapa revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri 1.0 (1784) ditandai dengan adanya mekanisasi, mesin uap, manufaktur baru, industri tekstil, *iron production*, pabrik bertenaga uap, dll. Revolusi industri 2.0 (1870) ditandai dengan adanya teknologi, kelistrikan, produksi massal, penggunaan telegraf, gas, dan pasokan air secara luas. Revolusi industri 3.0 (1969) ditandai dengan adanya komputer (internet), manufaktur digital, PLC (*programmable logic controller*) / (robotik), mesin digital, IT dan IoT, dan jaringan elektronik. Revolusi industri 4.0 (era saat ini) ditandai dengan adanya konvergensi IT dan IoT, mesin otonom, robot canggih, big data (analisis), *internet of things*, *cyber physical*, serta pengetahuan mesin dan AI (*artificial intelligence* / kecerdasan buatan) [2]. Pergeseran dari satu revolusi industri ke tahap berikutnya berlangsung semakin cepat dan singkat, terutama dari era revolusi industri 3.0 menuju 4.0.

Dalam keadaan seperti itu maka pendidikan dibutuhkan untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat dibanding kondisi sebelumnya, melaksanakan pekerjaan yang belum pernah

ada sebelumnya, menggunakan teknologi masa depan, serta **mengatasi** tantangan sosial yang belum dapat dibayangkan. Agar hal itu terwujud maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, cara berpikir yang baru (*new ways of thinking*), di antaranya dalam hal kreatifitas, problem solving, decision making, dan berpikir kritis. *Kedua*, cara kerja yang baru (*new ways of working*), seperti komunikasi dan kolaborasi. *Ketiga*, alat-alat pekerjaan (*Tools for Working*) untuk mengenali dan menemukan potensi teknologi baru. *Keempat*, kemampuan untuk hidup di tengah masyarakat majemuk secara aktif dan bertanggung jawab.

Di samping itu dibutuhkan beberapa kemampuan lainnya yang bersifat lebih mendasar, agar dapat berperan secara optimal dalam menentukan perkembangan masyarakat. *Pertama*, literasi, baik dalam arti lama (kemampuan membaca, menulis, berhitung) maupun dalam arti yang baru (literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia) [3]. *Kedua*, kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS / higher order thinking skill). Lorin Anderson menyampaikan bahwa terdapat 6 kemampuan berpikir dengan tingkatan yang berbeda, yaitu menghafal, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi (menilai), dan mencipta (mengkreasikan). *Ketiga*, kemampuan abad ke-21, yaitu kritis dalam berpikir dan bertindak, kolaborasi, komunikasi, dan kreatifitas. *Keempat*, kemampuan berpikir komputasional (menggabungkan pemikiran kritis, kemampuan komputasi yang baik, ditambah dengan pemanfaatan teknologi) [4, pp. 11–12]. Pesantren perlu mengembangkan kemampuan berpikir pada taraf tinggi dan dalam lingkup yang besar jika berharap memiliki kesiapan dalam menghadapi masyarakat industrial yang semakin maju [5, p. 289]. Pemikiran tingkat tinggi dapat dikembangkan jika pesantren memberikan ruang yang cukup bagi berkembangnya kesadaran kritis di dalamnya.

Ada tiga kategori pengetahuan manusia menurut Habermas. *Pertama*, pengetahuan instrumental (*instrumental knowledge*) yang berguna untuk memprediksi, mengontrol, mengeksploitasi dan memanipulasi terhadap obyeknya. Pengetahuan ini disebut juga positivisme. *Kedua*, pengetahuan

hermeneutik (hermeneutic knowledge atau interpretative knowledge) yang berfungsi untuk memahami. *Ketiga*, pengetahuan kritik (critical knowledge atau emancipatory knowledge) yang berfungsi sebagai katalis untuk membebaskan potensi manusia dari hal-hal yang menghalanginya untuk berkembang secara lebih optimal [6, p. 29]. Pengetahuan kritik ini timbul dari adanya kesadaran kritis yang dapat mengantarkan terwujudnya pembebasan manusia dari ketidakadilan struktur sosial, budaya, ekonomi, politik dan lingkungan masyarakat yang melingkupinya.

Pengembangan kesadaran kritis merupakan hekekat dari pendidikan sebagaimana yang menjadi perhatian dan perjuangan Paulo Freire [6, p. 38]. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia dari kesadaram magis maupun naif menuju kesadaran kritis [7, p. 9].⁰ Dengan kesadaran magis, seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Dengan kesadaran ini seseorang memiliki anggapan bahwa kondisi yang dialami dan diterima oleh masyarakat semata-mata adalah ketentuan dari Tuhan, bukan karena kesalahan manusia maupun ketidakadilan struktur sosial. Kesadaran naif membuat seseorang memiliki pemahaman bahwa masalah yang dialami oleh manusia adalah disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri, bukan karena struktur yang tidak adil maupun karena telah menjadi ketentuan Tuhan. Kesadaran kritis tidak melihat aspek manusianya semata-mata mapun takdir Tuhan yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan, tetapi karena adanya struktur sosial, budaya, politik dan ekonomi yang tidak adil. Diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi struktur sosial yang ada, melakukan analisa terhadap bekerjanya struktur sosial tersebut, serta mentransformasikannya menjadi lebih baik. Kesadaran kritis melahirkan *critical mass* serta memperkuat *public sphere* [6, pp. 38–39].

Untuk mencapai kesadaran kritis, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilakukan, yaitu naming (identifikasi), reflecting (analisa), dan acting (transformasi) [8]. Pada tahap naming, disampaikan pertanyaan tentang sesuatu,

baik yang berupa teks tertulis maupun realitas sosial budaya. Pertanyaannya adalah *what is the problem*. Pada tahap berikutnya adalah *reflecting* dengan maksud untuk mempertajam permasalahan, dengan cara menyampaikan pertanyaan *why is it happening*. Selanjutnya adalah pertanyaan dalam rangka menemukan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Tahapan yang ketiga ini memasuki wilayah praksis. Pertanyaan yang diajukan adalah *what can be done to change the situation* [7, p. 10]. Ketiga tahapan tersebut tidak bisa dipisahkan, dan selalu terkait dalam rangka melangsungkan pendidikan untuk mengembangkan kesadaran kritis. Kesadaran kritis akan tumbuh dan berkembang dengan baik melalui tradisi bertanya, mulai dari hal-hal yang sangat sederhana hingga yang lebih kompleks dan komprehensif.

Lahirnya suatu ilmu pengetahuan serta perkembangannya lebih lanjut selalu dimulai dari tradisi bertanya. Demikian juga ditemukannya teknologi baru juga dimulai dari upaya untuk menjawab suatu pertanyaan (permasalahan). Karena itu upaya untuk menghadapi dampak dari perkembangan teknologi tersebut perlu juga dikembangkan tradisi bertanya, sebagai awal dari lahirnya kesadaran kritis. Revolusi industri 4.0 lahir karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak sangat cepat serta berakibat pada kompleksitas dan heterogenitas perkembangan masyarakat, baik secara kelembagaan maupun norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pijakannya. Pesantren memiliki tantangan besar untuk menyikapi kondisi tersebut dengan cara mengembangkan kesadaran kritis di dalamnya, sebagai salah satu kemampuan yang dibutuhkan saat ini. Apakah upaya ini memungkinkan untuk dilakukan pesantren dan bagaimana pula lembaga pendidikan ini memberikan ruang cukup bagi berkembangnya kesadaran kritis tersebut. Kedua pertanyaan tersebut menjadi fokus kajian berikut ini.

2. Metode

Artikel ini disusun dengan metode kualitatif berjenis studi literatur. Analisis isi dimanfaatkan sebagai alat untuk

memformulasikan konsep kesadaran kritis di pesantren yang ideal sebagai wujud mempersiapkan para santri menuju persaingan global di era revolusi 4.0 saat ini. Dengan demikian, maka akan didapatkan kesimpulan yang komprehensif.

3. Hasil

A. Pengetahuan dan Kesadaran Kritis

Secara umum, berdasarkan logika berpikirnya masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu orang awam (*man on the street*), sosiolog, dan filosof [9, pp. 65–68]. Orang awam akan melihat realitas sosial secara *taken for granted*, tanpa mempertanyakan eksistensi dan hakekatnya. Filosof melihat realitas sosial dengan cara mempertanyakan hakekatnya, baik secara ontologi maupun epistemologinya. Pertanyaan yang diajukan dimaksudkan untuk menemukan apa hakekat dari realitas sosial tersebut dan bagaimana realitas sosial tersebut ada. Sementara itu, sosiolog akan melihat realitas sosial dengan cara memahaminya sebagai fakta sosial tanpa memberikan penilaian baik atau buruk terhadap realitas tersebut. Tradisi berpikir sosiologis, di antaranya, melahirkan suatu tipe ideal dalam rangka membangun suatu konsep dalam kehidupan sosial. Tipe ideal dikembangkan dan dikonstruksikan oleh ilmuwan sosial untuk mengungkapkan bentuk-bentuk realitas sosial yang sesungguhnya. Untuk dapat merumuskan tipe ideal tersebut maka dibutuhkan kerja serius melalui proses meleburkan diri ke dalam realitas sosio historis dan kultural masyarakat, kemudian setelah dikaitkan dengan referensi pengetahuan yang dimiliki, diperoleh suatu konsep yang bersifat mendasar [9, pp. 70–72]. Proses tersebut membutuhkan kesadaran dan pengetahuan kritis sebagai pijakannya.

Pengetahuan kritis dimiliki seseorang jika ia dapat menunjukkan realitas yang sesungguhnya dari suatu fenomena yang sedang dihadapi. Hal ini bisa dilakukan jika ia mampu menunjukkan keterkaitan antara suatu aspek dengan aspek lainnya sehingga ditemukan pemahaman secara komprehensif dan mendalam serta terhindar dari simplifikasi. Dengan pemahaman tersebut ia semakin terbuka terhadap ide dan

gagasan pihak lain serta semakin percaya diri. Setiap ide, gagasan, dan pemikiran orang lain sangat berharga, meskipun berbeda dengan pemikirannya sendiri. Perbedaan pendapat bukan berarti harus dihilangkan tetapi sebaliknya perlu digali lebih jauh sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan pemahamannya. Untuk mendapatkan pengetahuan kritis dibutuhkan kesadaran kritis. Kesadaran ini dapat dikembangkan melalui dialog yang dimaksudkan bukan untuk mendapatkan konsensus (kesepahaman), tetapi yang terpenting adalah untuk memperbandingkan antara suatu pemikiran dengan pemikiran lainnya dan antara pemikiran dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pembandingan ini memerlukan refleksi secara terus menerus yang selanjutnya menghasilkan kesadaran kritis [7, pp. 8-9].

Kesadaran kritis diperoleh melalui proses pembelajaran secara terus menerus. Dalam proses ini tradisi bertanya terus dikembangkan untuk menemukan *the deep structure* dari realitas sosial. Karena itu yang lebih ditekankan dalam pembelajaran adalah bagaimana cara mendekati realitas tersebut (*how to think*), bukan hanya terbatas pada keberadaan realitas itu sendiri (*what to think*). Dalam hal ini, metode dan pendekatan pembelajaran lebih penting dibanding materinya. Dekodifikasi, problematisasi, dan transformasi merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan dalam metode hadap masalah (*problem posing method*) yang dikembangkan dalam rangka melahirkan kesadaran kritis. Kesadaran ini dimaksudkan untuk mengatasi apa yang disebut oleh Herbert Marcuse sebagai *false consciousness* (kesadaran palsu), suatu kesadaran bahwa realitas sosial yang dihadapinya bersifat normal, ideal dan final, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya.

Kesadaran kritis diperlukan untuk menghasilkan manusia-manusia yang kreatif, produktif dan inovatif. Metode dialogis dan hadap masalah sebagai proses yang ditempuh untuk melahirkan kesadaran ini perlu dikuatkan dan didukung oleh tindakan kolaborasi dan komunikasi [4, pp. 11-12]. Dalam hal ini, kesadaran kritis saja tidak cukup untuk dapat secara optimal

menghadapi tantangan perkembangan masyarakat, terutama di era revolusi industri 4.0. Meskipun demikian, kesadaran kritis menjadi awal yang sangat penting untuk menghasilkan pengetahuan kritis dan pengetahuan tingkat tinggi lainnya serta kemampuan yang diperlukan di abad ke-21 ini. Perpaduan antara kesadaran kritis dengan berbagai pengetahuan dan kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 sekaligus masyarakat pada era 5.0 yang dikenal dengan *imagination society*.

B. Dasar-Dasar Kesadaran Kritis di Pesantren

Pertumbuhan, perkembangan, dan keberlangsungan tradisi pesantren terkait sangat erat dengan kondisi sosial budaya yang melingkupinya. Secara historis, tradisi keilmuan pesantren telah ada sejak awal perkembangan tradisi keilmuan di masa-masa awal terbentuknya masyarakat Islam. Tradisi ini telah menyerap filsafat Hellenisme (Yunani). Sejak akhir abad ke-13 keilmuan Islam juga telah menyerap tradisi mistik dari Kabbalah Yahudi. Pergulatan dalam tradisi keilmuan inilah yang menjadi asal-usul tradisi pesantren. Karena itu, tradisi pesantren tidak hanya melahirkan ulama dengan kemampuan ilmu yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki keimanan dan ketaatan beribadah yang sangat kuat [10, pp. 216–219].

Pada masa berikutnya, tradisi serta epistemologi keilmuan pesantren berkembang melalui berkembang dan tersebarnya kitab kuning sebagai literatur universal. Kitab karya ulama salaf ini menjadi acuannya sejak awal pembentukan lembaga pendidikan asli Indonesia ini hingga perkembangannya berabad-abad lamanya. Literatur tersebut tetap terpelihara dengan sangat baik sebagai rujukan sistem nilai dan keilmuan pesantren, terutama karena adanya jaringan keilmuan yang sangat kuat dengan tradisi keilmuan di Timur Tengah (terutama Mekah dan Madinah) [10, p. 237]. Jaringan ini dibangun, terutama, sejak abad ke-16 dan terus berlangsung pada abad ke-17, ke-18 [11], ke-19, dan ke-20 [12], Bahkan hingga saat ini para alumni pesantren masih banyak yang melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah, di samping banyak juga yang belajar di negara-negara Barat.

Literatur universal tersebut tetap terpelihara dengan baik di pesantren karena didukung oleh kepemimpinan kyai yang memiliki ciri khas tertentu. Pernyataan dari Nabi Muhammad Saw. tentang ulama sebagai pewaris para Nabi melahirkan keyakinan masyarakat bahwa kyai memiliki otoritas tunggal untuk menafsirkan sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Quran dan Hadits. Mereka diakui sebagai pemegang sekaligus penafsir kebenaran ajaran Islam yang sesungguhnya. Di sisi lain, dibutuhkan pencapaian standar tertinggi dalam ilmu agama untuk mencapai kedudukan sebagai kyai tersebut [10, pp. 236-237]. Upaya ini dilakukan melalui pembelajaran kitab kuning secara tuntas. Salah satu tradisi yang dikembangkan untuk memperoleh kedalaman dan kematangan ilmu pengetahuan adalah dengan cara menjadi santri kelana yang berpindah dari satu kyai ke kyai lain. Tujuannya adalah agar dapat menguasai beragam ilmu dari berbagai kyai yang memiliki spesialisasi berbeda-beda [13, pp. 24-28].

Kitab kuning menjadi kekuatan utama dalam tradisi pesantren. Kitab-kitab yang pada umumnya ditulis pada abad ke-10 sampai dengan ke-15 ini tetap menjadi sumber pembelajaran utama di pesantren. Meskipun telah banyak kitab-kitab baru karya para ulama setelah abad ke-15, tetapi polanya maupun tema bahasannya tidak berbeda dengan yang telah ada dan dikaji secara meluas di pesantren. Banyak ulama Indonesia yang sangat produktif dan menghasilkan karya tulis di berbagai bidang keilmuan. Kyai Hasyim Asy'ari (1871-1947), misalnya, telah menghasilkannya tidak kurang dari 15 karya tulis dan semuanya berbahasa Arab [14].

Meskipun tampak statis dan dianggap sudah tuntas, kitab kuning telah mampu menunjukkan bahwa tradisi keilmuan pesantren sangat kaya, fleksibel, dan kontekstual. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perbedaan perspektif dari para ulama pada hampir setiap tema bahasan di dalamnya. Dan jika ada perkembangan dalam tradisi keilmuan, biasanya hanya terkait dengan pergeseran dalam tekanan perhatiannya. Misalnya, pada saat tertentu sebagian ulama lebih menekankan pada fiqh, dan

pada saat lainnya lebih menekankan pada hadits. Perbedaan perspektif inilah yang menyebabkan tradisi pesantren sangat dinamis. Secara teoritis para kyai di pesantren tetap menjadikan pendapat para ulama di kitab kuning sebagai acuannya, tetapi dalam tataran praktis mereka dapat memahami dinamika perubahan sosial yang terjadi [15, p. 100], dengan cara melakukan kontekstualisasi ajaran di dalamnya.

Apa yang dilakukan oleh para kyai tersebut menunjukkan bahwa ajaran agama yang kemudian ditafsirkan dan dikodifikasikan melalui kitab kuning masih mejadi acuan utama di kalangan kyai. Hanya saja, karena kondisi sosial-budaya yang melingkupinya, para kyai berupaya untuk mengkontekstualisasikan normatifitas ajaran kitab kuning tersebut ke dalam realitas sosial budaya masyarakat. Mereka selalu berupaya untuk bertindak fleksibel, namun dengan batasan tetap berpedoman pada ajaran agama. Hal lain yang dapat menentukan pandangan para kyai adalah latar belakang pendidikan mereka, tipologi pondok pesantren yang dikelola (diasuh) dan intensitas (kesungguhan dan kedalaman) pemahaman terhadap teks kitab kuning. Perbedaan intensitas pemahaman tersebut memiliki peran cukup besar untuk membuat pandangan mereka berbeda [16].

Salah satu ciri khas pesantren yang membedakannya dengan lembaga lain adalah di satu sisi selalu berpijak pada tradisi yang dimiliki, sedangkan di sisi lainnya adalah selalu berupaya untuk merespon secara positif dan kreatif terhadap kebutuhan masyarakat. Maka lahirlah diktum yang sangat terkenal, “Melestarikan hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik” [17, p. ix]. Berdasarkan landasan ini maka perkembangan pesantren tidak semata-mata ditentukan oleh struktur di luar pesantren dan bukan pula, sebaliknya, semata-mata oleh kehendak pesantren sendiri. Dalam hal ini, selalu terjadi dialektika (dualitas) antara kemandirian tradisi pesantren dengan kebutuhan perubahan dari struktur sosial di luar pesantren. Karena itu, gagasan dan tindakan yang dilakukan pesantren selalu bersifat kontekstual dan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat [18, pp. 249–254].

Memahami dinamika pesantren seperti itu maka pada dekade pertama abad ke-20, seorang sarjana Belanda, Snouck Hurgronje, telah memperingatkan para sarjana lainnya di *Netherlands East Indies Civil Service* bahwa Islam Indonesia berkembang sangat dinamis. Perkembangan yang sangat fundamental tersebut bergerak secara bertahap, sangat halus dan pada umumnya berlangsung di tempat-tempat terpencil. Akibatnya, para sarjana tidak mampu menangkap realitas tersebut [19, pp. 17–18]. Demikian juga, HAR Gibb menyatakan bahwa sepanjang 6 abad tidak pernah ada aliran dalam agama yang benar-benar statis sepenuhnya [20, pp. viii–ix]. Dalam hal ini, meskipun tradisi pesantren tampak tidak berubah sejak abad ke-13, tetapi realitasnya, perkembangan pesantren saat ini menunjukkan tingginya dinamika di dalamnya. Dinamika yang ditunjukkan secara meyakinkan oleh Hurgronje dan Gibb tersebut pada dasarnya merupakan ciri khas dari tradisi pesantren.

Tradisi pesantren yang selalu memadukan antara universalitas dengan lokalitas, antara jaringan keilmuan internasional dengan budaya lokal serta antara pencapaian keilmuan setinggi-tingginya dengan keimanan yang berakar sangat kuat tersebut selalu bergerak secara dinamis di tengah arus perkembangan masyarakat. Pergulatan tradisi pesantren selalu berlangsung secara dialektik dengan perkembangan masyarakat. Karena itu, meskipun banyak kesamaan yang dimiliki pesantren, dalam realitasnya lembaga ini bersifat heterogen dan tidak tunggal [21, pp. xi–xii]. Pemikiran yang berkembang di kalangan ilmuwan sosial belakangan ini menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat tidak hanya ditentukan dari satu arah, tetapi saling terkait (dialektis) satu sama lain, dan bahkan sangat kompleks. Realitas sosial terbentuk oleh adanya hubungan dualitas (dialektika) agen / pelaku (subyektif) dengan struktur sosial (obyektif). Dalam hal ini, Dengan didukung oleh watak mandiri yang dimilikinya [10, p. 121], di samping memadukan *universalitas*, yang menurut Robert Redfield, sebagaimana dikutip oleh Pranowo [22, pp. 13–16], disebut sebagai “tradisi besar” dengan *lokalitas* sebagai “tradisi kecil”, pesantren selalu

menciptakan tradisinya sendiri.

Tradisi dialogis dan dialektik tersebut menjadi kekayaan pesantren yang membuatnya dapat berkembang di tengah masyarakat yang selalu berubah. Dalam kajian sejarah, tradisi dialogis tersebut tidak dapat dilepaskan dari tradisi kritik di kalangan para ulama yang menjadi rujukan pondok pesantren. Sejarah kodifikasi hadis, misalnya, diwarnai oleh kritik sanad maupun matan yang berlangsung secara dinamis. Demikian juga perjalanan riwayat hidup al-Ghazali, sebagai salah satu rujukan dari tradisi pesantren, memberikan contoh dengan baik terkait dengan perlunya mengembangkan pemikiran kritis untuk menemukan hakekat kebenaran. Melalui karya tulisnya *Tahafut al-Falasifah*, al-Ghazali mengkritisi kesesatan metafisika yang dikembangkan oleh para filosof. Namun di sisi lain, al-Ghazali sangat mendukung tradisi filsafat, terutama di bidang logika. Hal ini dilakukan semata-mata untuk tetap mengembangkan pemikiran kritis dengan cara berupaya sepenuhnya menghindari kesesatan dalam berpikir. Di sisi lain, melalui karya tulisnya *al-Munqidz Min al-Dlalal*, al-Ghazali menjelaskan proses yang ia tempuh dalam rangka menemukan kebenaran. Melalui proses ini, ia telah menemukan kebenaran hakiki bukan dengan berfilsafat, tetapi dengan menempuh jalan tasawuf.

Al-Ghazali menulis kitab "*Tahafut al-Falasifah*" untuk mengkritisi para filosof. Namun di sisi lain, ia juga menulis beberapa kitab untuk mengkritisi secara tajam terhadap kelompok masyarakat yang anti pemikiran rasional (ilmu mantiq). Kritikan tersebut, misalnya, ditulis dalam kitab "*al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*". Di dalam kitab "*Mi'yar al-Ilmi*" al-Ghazali merumuskan kaidah-kaidah logika yang logis dan benar untuk menghindari kekeliruan dalam berpikir. Dalam kitab yang kedua tersebut ia menyatakan, "Siapapun yang tidak menguasai ilmu mantiq maka kapasitas keilmuannya tidak dapat dipercaya." [23, p. 179]

Sikap kritis dan rasionalis al-Ghazali tetap dipertahankan secara konsisten sampai akhir hayatnya. Bukti yang sangat nyata ditunjukkan al-Ghazali melalui kitab monumentalnya "*Ihya' 'Ulum al-Din*". Di dalam kitab tersebut, banyak hadits yang dari sisi riwayat (isnad) diragukan keshahiannya, meskipun dari

aspek dirayah (matan / substansi) memiliki manfaat sangat besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, al-Ghazali menggunakan logika rasional untuk menentukan hadits yang layak untuk dimuat dalam kitab tersebut, meskipun dari aspek periwayatannya sulit untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya [24]. Adapun terhadap tuduhan bahwa al-Ghazali anti filsafat (pemikiran rasional) dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang diserang al-Ghazali bukanlah pemikiran filosofis secara keseluruhan, tetapi hanya sebatas pada filsafat metafisika neoplatonisme. Alasannya adalah karena dalam bentuk filsafat ini terdapat kesewenang-wenangan para filosof. Bahkan berdasarkan prinsip-prinsip logika, menurut al-Ghazali, filsafat metafisika dianggap sebagai penyelewengan terhadap filsafat itu sendiri.

Yang perlu diketahui adalah bahwa al-Ghazali tidak menolak masalah-masalah metafisika. Bukanlah objek-objek metafisika yang ia persoalkan, tetapi jawaban para filosof terhadap metafisika yang mereka berikan dengan cara sewenang-wenang berdasarkan akal mereka. Karena pada dasarnya, yang menggerakkan al-Ghazali untuk memulai perjalanan spiritual justru adalah berupa pertanyaan-pertanyaan metafisika. Di sisi lain, sikap kritis al-Ghazali terhadap filosof tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki perhatian besar terhadap pengetahuan kritis. Hal ini dapat dipahami lebih jauh, di antaranya, melalui kitab “al-Munqidz min al-Dlalal”. Melalui kitab ini secara serius ia menguraikan persoalan-persoalan yang pada umumnya dikenal sebagai persoalan epistemologis, di antaranya yang terkait dengan hakikat pengetahuan, validitas pengetahuan dan sumber-sumber pengetahuan.

Dalam perjalanan sejarah dunia pesantren sendiri, tradisi kritik juga telah dikembangkan para kyai pada masa lalu. Sebagai contohnya adalah adanya perbedaan pandangan antara KH. Hasyim Asy’ari dari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dengan Kyai Faqih dari Pondok Pesantren Maskumambang Gresik tentang menabuh *kentongan* sebagai tanda tibanya waktu sholat. Bahkan perdebatan itu ditulis secara terbuka melalui majalah yang diterbitkan NU pada edisi pertama dan kedua tahun

1928. Saat itu KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar NU, sedangkan Kyai Faqih sebagai wakilnya [25]. Demikian juga perbedaan pandangan hukum berlangsung secara keras antara KH. Abd. Wahab Hasbullah dari Pondok Pesantren Tambakberas Jombang dengan KH. Bisri Sansuri dari Pondok Pesantren Denanyar Jombang, keduanya sebagai Rais 'Am NU dan wakilnya.

Tradisi ini dilestarikan dan dikembangkan oleh pesantren melalui berbagai macam kegiatan yang dikelolanya. Kegiatan *bahts al-masa'il*, *bahts al-kutub* dan sejenisnya memberikan ruang dan kesempatan kepada santri untuk menyampaikan pandangan dan pemikirannya secara berbeda dengan santri lainnya. Mereka menunjukkan sumber rujukan dan penjelasannya masing-masing untuk menanggapi permasalahan yang sama. Perbedaan pandangan di kalangan para ulama penulis kitab kuning yang menjadi sumber rujukan pesantren menunjukkan bahwa dalam suatu materi kajian yang sama akan melahirkan banyak penjelasan yang berbeda jika menggunakan metode kajian dan pendekatan yang berbeda.

Di Pesantren Tebuireng Jombang, misalnya, pada masa kepengasuhan KH. Hasyim Asy'ari dibentuk kelas khusus yang dikenal dengan kelas musyawarah. Kelas yang dipimpinnya secara langsung ini diikuti oleh santri-santri pilihan yang telah memiliki bekal keilmuan cukup tinggi. Kelas ini menghasilkan ahli-ahli ilmu agama yang sangat disegani bukan hanya pada lingkup regional tetapi secara nasional [26]. Upaya KH. Hasyim Asy'ari ini, yang juga banyak berlangsung di berbagai pesantren, menunjukkan bahwa pada dasarnya pesantren memiliki tradisi dalam pemikiran kritis dengan cara mengembangkan metode diskusi, musyawarah, dialogis, dan dialektik. Metode tersebut sangat berguna dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan perkembangan masyarakat secara kritis, kompetitif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif.

4. Pembahasan

A. Upaya Pengembangan Kesadaran Kritis di Pesantren

Pada awalnya, perbincangan tentang keterkaitan pesantren

dengan perkembangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari wacana mengenai pembangunan dan modernisasi yang mulai berkembang di Indonesia sejak awal tahun 1970-an. Ideologi pembangunan yang berkembang saat itu menjadikan “partisipasi” sebagai aspek utama bagi kelancaran program-program pembangunan. Dari sinilah maka pesantren menjadi perhatian menarik dari berbagai kalangan dalam rangka mendukung “partisipasi” tersebut [27, p. xii]. Paling tidak terdapat tiga landasan pemikiran di balik lahirnya gagasan tentang keterlibatan pesantren dalam partisipasi tersebut. *Pertama*, pembangunan memerlukan dukungan dari pesantren yang diperkirakan berakar pengaruhnya pada masyarakat. Dukungan itu tidak mesti ditujukan kepada rezim yang memerintah, tetapi terhadap program pembangunan itu sendiri. *Kedua*, pembangunan itu pada akhirnya adalah kegiatan dari masyarakat sendiri. Karena itu pada tahap ini diperlukan partisipasi terhadap program-program pembangunan. *Ketiga*, dalam proses pembangunan yang berjalan cepat, terdapat kemungkinan besar bahwa pesantren tidak saja akan ketinggalan dalam perkembangan dan perubahan, tetapi juga bisa terancam eksistensinya. Karena itu diperlukan usaha serius agar pesantren tetap bisa memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan masyarakat [27, pp. xii–xiii].

Berdasarkan pola pemikiran tersebut maka pesantren mulai dilibatkan untuk melakukan program-program pengembangan masyarakat yang dipelopori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada awal tahun 1970-an. Di antaranya yang sangat intensif adalah LP3ES pimpinan Dawam Rahardjo. Dalam perkembangannya, para kyai yang terlibat dalam program tersebut merasakan perlunya dibentuk LSM yang dimotori oleh para kyai pengasuh pesantren, karena LSM yang telah ada tidak lahir dari kalangan pesantren. Atas inisiatif para kyai tersebut maka pada tanggal 18 Mei 1983 didirikan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) oleh para kyai pesantren terkemuka di Indonesia bersama dengan aktifis LSM tahun 1980-an.

Para pendiri P3M dari kalangan pesantren adalah KH.

Sahal Mahfudz (Pesantren Kajen Jawa Tengah), KH. M. Ilyas Ruhiyat (Pesantren Cipasung Jawa Barat), KH. Wahid Zaini (Pesantren Paiton Jawa Timur), KH. Yusuf Hasyim (Pesantren Tebuireng Jawa Timur) dan KH. Hamam Dja'far (Pesantren Pabelan Jawa Tengah). Sedangkan dari unsur LSM adalah KH. Abdurrahman Wahid, Dawam Rahardjo dan Sucipto Wirosarjono [28].

Secara historis, pesantren selalu merespon perkembangan masyarakat dengan strategi yang berbeda-beda. Tidak pernah ada bentuk tunggal bagi pesantren dalam menyikapi perkembangan masyarakat. Mereka memiliki sikap dan respon yang sangat beragam. Namun yang selalu sama pada semua pesantren adalah bahwa sikap tersebut bertitik tolak pada ajaran dan keyakinan keagamaan serta berorientasi pada dinamika masyarakat [21, p. 75]. Hal ini dapat dipahami karena lahirnya pesantren disebabkan oleh motif keagamaan yang dalam perkembangannya juga menjadi lembaga social [29, p. 17]. Sebagai konsekuensinya adalah bahwa pesantren memiliki tanggung jawab dan kepedulian tinggi terhadap perkembangan masyarakat.

Sikap pesantren terhadap perkembangan masyarakat memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Tradisi pesantren berakar dari tradisi keilmuan Islam yang berkembang sejak lahirnya masyarakat Islam pertama kali pada masa sahabat. Pada masa itu, mereka tidak hanya mengembangkan aspek keimanan secara mendalam, tetapi juga aspek keilmuan setinggi-tingginya [10, pp. 214-221]. Ketika terserap pertama kali oleh masyarakat Islam di Indonesia, tradisi tersebut kemudian terwujud dalam tradisi neo-sufisme yang berkembang secara meluas dan bertahan dalam waktu yang sangat lama. Tradisi yang menyatukan secara dialektis antara aspek keimanan mendalam dengan pencapaian ilmu setinggi-tingginya tersebut, kemudian berkembang menjadi tradisi pesantren di Indonesia hingga saat ini. Diktum yang sangat terkenal di lingkungan pesantren, "mempertahankan nilai-nilai lama yang bagus serta mengambil nilai-nilai baru yang lebih bagus", merupakan gambaran dari kuatnya pengaruh neo-sufisme.

Berdasarkan tradisi itu pula, pesantren memiliki jaringan

keilmuan internasional sangat kuat dengan Timur Tengah, terutama Mekah dan Madinah [11, pp. 53–54]. Dari kedua tempat ini para ulama dan pelajar dari seluruh dunia terlibat dalam jaringan yang sangat kuat. Keduanya juga menjadi simbol bagi pertemuan secara dinamis dan dialektis antara berbagai pemikiran yang berbeda-beda. Karena itu jaringan keilmuan ini berwatak kosmopolit. Melalui jaringan keilmuan ini, tradisi pesantren berkembang secara dinamis. Di samping itu, pesantren juga memiliki kemampuan sangat tinggi dalam mengakomodasi budaya lokal [30, p. 342]. Sikap ini membuat pesantren semakin fleksibel dalam menyikapi perkembangan masyarakat. Bahkan konsep jihad yang dimiliki pesantren adalah “peaceful jihad” (jihad damai), sebagaimana hasil kajian dari Ronald Lukens-Bull tentang jihad yang dilakukan pesantren melalui pengembangan pendidikan [31]. Sikap seperti ini juga dapat menjadi dasar argumentasi bagi semakin banyaknya alumni pesantren maupun orang-orang yang berasal dari tradisi pesantren yang kemudian memperkaya ilmunya dengan cara menempuh pendidikan di negara-negara Barat.

Karena posisinya sebagai subkultur, sebagaimana istilah yang diperkenalkan oleh Abdurrahman Wahid, pesantren memiliki otonomi yang sangat tinggi. Ketika menghadapi arus perkembangan masyarakat yang semakin kuat, pesantren dapat menyikapinya secara kreatif, apalagi karena tradisi pesantren sendiri identik dinamika masyarakat. Bahkan jika mengacu pada hasil kajian tentang sikap kyai [32], misalnya, maupun pesantren terhadap perkembangan masyarakat, dapat ditunjukkan bahwa pesantren tidak semata-mata sebagai “filter” (penyaring) tetapi juga secara mandiri dan kreatif melakukan pengembangan. Dalam hal ini, pesantren selalu berupaya melestarikan dan memperkuat tradisinya. Karena itu, pesantren juga mengembangkan hubungan sosial-kekerabatan antar sesama pesantren dalam rangka melestarikan tradisinya [13, p. 60].

Watak dinamis dan fleksibel yang dimiliki pesantren tersebut, membuat lembaga ini selalu mampu berhubungan secara dialektis dengan perkembangan masyarakat yang terus

berlangsung semakin cepat. Hal ini sejalan dengan pendekatan dialektik terhadap perubahan sosial sebagaimana yang dikembangkan oleh Berger, Giddens dan Bourdieu. Karena itu, pesantren tidak dapat hanya bertahan secara pasif dalam kemandiriannya. Lingkungan sosio-historis yang menentukan dinamika hubungan pesantren dengan perkembangan masyarakat, sebagaimana penjelasan dari Berger, semakin bergerak secara dinamis. Perkembangan masyarakat melaju tunggang langgang bagaikan *juggernaut*, sebagaimana ditunjukkan oleh Giddens, sehingga semakin banyak ketidakpastian hasil ciptaan manusia (*uncertainties manufactured*). Dalam kondisi semacam ini, pesantren perlu mengembangkan dirinya agar dapat bergerak di berbagai “ranah” secara lebih dinamis serta memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, makmur dan berkeadilan. Di samping itu, ia dapat berkembang secara kompetitif bersama dengan masyarakat pada tingkat lokal, nasional hingga global.

Pengembangan pesantren tidak semata-mata diarahkan pada aspek materi dan metode pembelajarannya, juga bukan hanya pada sisi kelembagaan dan unit pendidikannya. Agar pesantren tidak terjebak dan terhegemoni dalam pengaruh dinamika masyarakat yang bergerak semakin cepat dan kompleks maka perlu dikembangkan kesadaran kritis yang telah menjadi kekayaannya. Pengembangan kesadaran ini dapat dilakukan melalui berbagai macam media dan aktifitas rutin di pesantren. Berbagai upaya telah dilakukan pesantren untuk mengembangkan kesadaran kritis di dalamnya. Hal ini dapat dibuktikan oleh tetap berkembangnya pesantren hingga saat ini meskipun menghadapi beragam bentuk tantangan perubahan sosial budaya masyarakat. Karena itu, dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, pengembangan kesadaran kritis semakin dibutuhkan.

B. Tantangan Revolusi Industri 4.0 bagi Pesantren

Revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh *internet of thing* (internetisasi berbagai aspek kehidupan) telah melahirkan disrupsi dalam berbagai bidang, baik teknologi, industri, politik,

maupun pendidikan. Merebaknya berbagai aktifitas yang berbasis online menggantikan aktifitas sebelumnya yang bersifat offline. Di bidang pendidikan, proses pembelajaran yang semula menjadikan kelas sebagai satu-satunya tempat telah mendapat tantangan dengan adanya kelas jauh karena telah didukung oleh teknologi komunikasi dan informasi yang lebih maju. Sumber belajar yang semula berupa buku cetak yang tersedia di perpustakaan atau harus dibeli di toko buku, saat ini dapat diperoleh secara gratis, lebih mudah dan bebas berupa teks-teks tulis secara online karena semakin lancar dan meluasnya jaringan internet. Perkembangan ini merubah cara pandang dan gaya hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya.

Pada dasarnya, disrupsi merupakan gangguan terhadap tata kehidupan sosial sehingga terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Gangguan itu, terutama, berupa semakin melemahnya hubungan sosial serta lunturnya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi acuan bersama, dalam semua aspek kehidupan manusia [33]. Meskipun demikian, pada sisi lainnya disrupsi dapat menjadi tantangan, rangsangan sekaligus pemicu untuk melakukan tindakan-tindakan kreatif dan inovatif jika disikapinya secara kritis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu menghasilkan akibat-akibat positif maupun negatif. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan otomatisasi di berbagai aspek kehidupan akan melahirkan *great disruption* yang berdampak besar pada tata kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Salah satunya adalah pesantren, sebagai lembaga pendidikan *indigenous* (asli Indonesia). Namun pesantren akan dapat mengarahkan disrupsi tersebut secara positif jika mampu mengembangkan nilai-nilai dan tradisi yang telah menjadi kekayaannya. Kejujuran, keihlasan, kemandirian, kedisiplinan, dan kebersamaan merupakan sebagian dari nilai pesantren yang patut dipertahankan [34], [35]. Sementara itu, sikap kritis, dialogis, dialektik dan belajar sepanjang hayat merupakan beberapa tradisi pesantren yang perlu dikembangkan. Nilai-nilai dan tradisi pesantren tersebut dapat terus dipertahankan dan dikembangkan dalam rangka menghadapi

tantangan revolusi industri 4.0 yang melahirkan *great disruption*, jika pesantren selalu dapat melestarikan dan mengembangkan kesadaran kritis di dalamnya.

Berbagai upaya yang dianggap dapat mengembangkan kesadaran kritis secara berkelanjutan adalah sebagai berikut. *Pertama*, memperkenalkan kekayaan dan tradisi keilmuan pesantren secara intensif kepada warga pesantren maupun kepada masyarakat luas. Pesantren sangat kaya dengan tradisi perbedaan pendapat dan pemikiran yang berwatak komprehensif. *Kedua*, memperkuat budaya belajar di lingkungan pesantren. Pesantren memiliki budaya belajar berkelanjutan, sepanjang waktu dan sepanjang hayat. *Ketiga*, mengembangkan tradisi diskusi dan musyawarah secara lebih serius. Tradisi *bahtsul masa'il* telah banyak menghasilkan santri yang memiliki wawasan luas dan kritis dalam memahami realitas sosial budaya dengan merujuk pada kitab kuning. Di samping itu, tradisi ini juga membiasakan mereka untuk dapat menerima perbedaan pendapat serta kelahiran ide-ide dan gagasan baru. *Keempat*, membiasakan *tabayyun* (konfirmasi) terhadap segala informasi yang diterimanya, sebelum melakukan tindakan untuk menyikapi informasi tersebut. Konfirmasi ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif terhadap berbagai realitas sosial yang dijumpainya, sehingga ditemukan substansi dari realitas tersebut. *Kelima*, mempertanyakan secara kritis sumbangsih pesantren terhadap perkembangan masyarakat. *Keenam*, melakukan refleksi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang berdampak pada keberadaan pesantren dan masyarakat. *Ketujuh*, melakukan tindakan nyata yang berguna bagi perkembangan pesantren dan masyarakat.

Secara historis, pesantren lahir, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bersama mereka berupaya menciptakan tatanan sosial budaya yang lebih adil dan berperadaban [36, p. 3]. Pesantren selalu berupaya untuk memahami realitas sosial budaya masyarakat, kemudian menyikapinya berlandaskan pada nilai-nilai agama yang dipadukan dengan tradisi masyarakat setempat. Tindakan ini

tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya kesadaran kritis yang dimiliki pesantren. Watak dasar pesantren seperti inilah yang perlu terus dilestarikan dan dikembangkan menghadapi tantangan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya. Berbagai upaya tersebut menjadi tugas yang dilakukan pesantren agar tetap dapat berperan secara optimal dalam memandu perkembangan masyarakat yang berkeadaban, dengan berpijak pada tradisinya yang selalu dipadukan dengan dinamika masyarakat.

Kesadaran dan pengetahuan kritis yang dimiliki pesantren membuat lembaga pendidikan ini dapat memahami secara mendalam dan komprehensif terhadap revolusi industri 4.0 dan revolusi masyarakat 5.0 serta disrupsi di berbagai bidang kehidupan yang ditimbulkannya. *Internet of thing* yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia tidak disikapinya dengan cara mengikuti sepenuhnya tanpa sikap kritis, demikian juga tidak bisa sepenuhnya menolak karena tidak mungkin menghindar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak semakin cepat. Dengan kesadaran kritisnya, pesantren akan melakukan identifikasi secara mendalam dan komprehensif terhadap revolusi industri dan dampak yang ditimbulkannya, menganalisisnya secara cermat dan detail, kemudian melakukan transformasi dampak negatifnya untuk mengelola aspek positif yang dikembangkannya. Dengan sikap ini maka disrupsi tidak semata-mata mengganggu pesantren dan kehidupan masyarakat pada umumnya tetapi juga memberikan tantangan, rangsangan, motivasi, sekaligus pemicu untuk melakukan tindakan-tindakan kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pesantren dan masyarakat secara lebih baik [33].

5. Kesimpulan

Sebagai lembaga pendidikan dan sosial, pesantren selalu berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya pengembangan pesantren dilakukan dalam berbagai aspeknya meliputi kurikulum, materi pembelajaran, metode pembelajaran, bentuk dan fungsi kelembagaan, sarana dan

prasarana, hingga jaringan sosial dan keilmuannya. Aspek lainnya yang perlu dikembangkan adalah kesadaran dan pemikirannya tentang kehidupan sosial budaya, karena hal ini berdampak penting pada sikap dan tindakannya dalam membangun kehidupan masyarakat. Dengan mengacu pada pemikiran Paulo Freire, terdapat tiga jenis kesadaran manusia, yaitu kesadaran magis, naif, dan kritis. Yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 saat ini adalah kesadaran kritis. Karena itu kebutuhan terhadap pengembangan kesadaran jenis ketiga ini menjadi keniscayaan.

Pesantren memiliki dasar-dasar pengembangan kesadaran kritis sejak awal kelahirannya hingga perkembangannya saat ini. Penerimaannya terhadap tradisi budaya lokal, perpaduan aspek fikih dengan tasawuf dalam format neo sufisme yang menjadi ajaran pesantren, pengembangan bidang keilmuan dan keimanan secara seimbang dalam pembelajaran di pesantren, tradisi diskusi dan musyawarah sebagai metode pembelajaran di pesantren maupun yang berlangsung dalam kegiatan *bahtsu masa'il*, misalnya, merupakan contoh nyata bahwa pesantren memiliki tradisi pembelajaran secara dialogis, dialektis, dan komunikatif secara lebih utuh. Jika dikelola dengan baik, tradisi ini menjadi sarana penting bagi berkembangnya kesadaran kritis, karena memungkinkan terbukanya ruang bertanya secara mendalam dan komprehensif untuk memahami realitas sosial yang sesungguhnya melalui proses *naming* (what is the problem), *reflecting* (why is it happening), sampai dengan *acting* (what can be done to change the situation).

Revolusi industri 4.0 yang diiringi oleh revolusi masyarakat 5.0 melahirkan disrupsi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pada dasarnya disrupsi ini menimbulkan gangguan pada masyarakat, namun dapat juga memberikan rangsangan sekaligus tantangan untuk dikelola secara positif jika dihadapi secara kritis, kreatif dan inovatif. Sebagai lembaga pendidikan *indigenous*, pesantren diharapkan dapat mengarahkan disrupsi tersebut secara positif jika mampu mengembangkan nilai-nilai dan tradisi yang telah menjadi kekayaannya. Nilai-nilai dan tradisi tersebut dapat terus dipertahankan dan dikembangkan jika

pesantren selalu dapat melestarikan dan mengembangkan kesadaran kritis di dalamnya. Dengan kesadaran ini, realitas sosial yang sedang berkembang dihadapainya dengan cara melakukan identifikasi secara komprehensif dan mendalam, menganalisisnya secara cermat, kemudian mentransformasikannya menuju kondisi yang lebih baik. Sementara itu, kesadaran ini memungkinkan untuk dikembangkan dengan baik karena secara historis pesantren lahir, tumbuh dan berkembang melalui tradisi dialog dan komunikasi intensif.

6. Daftar Referensi

- [1] M. Nuh, "Menuju 100 Tahun NU (2020) : Pendidikan Dan Mobilitas Vertikal," presented at the Seminar Nasional dalam rangka memperingati hari lahir Pesantren Tebuireng ke-120, Jombang, 2019.
- [2] D. Suprayitno, "Tantangan Pendidikan Nasional Menuju Satu Abad Indonesia," presented at the Seminar Nasional dalam rangka memperingati hari lahir Pesantren Tebuireng ke-120, Jombang, 2019.
- [3] M. Nasir, "Tantangan Perguruan Tinggi Menuju Satu Abad Indonesia," presented at the Seminar Nasional dalam rangka memperingati hari lahir Pesantren Tebuireng ke-120, Jombang, 2019.
- [4] S. Wahid, "Peran dan Sumbangsih Pesantren Tebuireng dalam Mencerdaskan Bangsa," presented at the Seminar Nasional dalam rangka memperingati hari lahir Pesantren Tebuireng ke-120, Jombang, 2019.
- [5] K. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2017.
- [6] M. Faqih, *Pendidikan Populer : Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: ReaD Books, 2000.
- [7] A. Nuryatno, *Madzhab Pendidikan Kritis : Menyingka Relasi pengetahuan politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- [8] P. V. Taylor, *The Texts of Paulo Freire*. Philadelphia: Open University Press, 1993.

- [9] H. Nugroho, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- [10] A. Wahid, *Menggerakkan Tradisi : Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- [11] A. Azra, *Jaringan ulama : Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII : Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- [12] I. Ismawati, *Continuity and Change : Tradisi Pemikiran Islam di Jawa Abad XIX-XX*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat RI, 2006.
- [13] Z. Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- [14] M. I. Hadziq, *Irsyad al-Syari Fi Jam'i Mushannafati al-Syaikh Hasyim Asy'ari*. Jombang: Al-Masruriyah, t.th.
- [15] M. V. Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading, 2015.
- [16] A. Taufiq, *Perspektif Gender Kyai Pesantren : Memahami Teks Menurut Konteks Relasi Gender dalam Keluarga*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- [17] Q. A. Azizy, "Memberdayakan Pesantren dan Madrasah," in *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, I. SM, Ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- [18] M. Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1986.
- [19] A. Mas'ud, *Dari Haramain Ke Nusantara : Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2006.
- [20] Z. Dhofier, "The Pesantren Tradition : A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java," Ph.D. Thesis, Australian National University, Sydney, 1980.
- [21] K. Hidayat, *Pesantren dan Elit Desa, dalam Dawam Rahardjo, Pergulatan Dunia Pesantren*. Jakarta: P3M, 1985.
- [22] B. Pranowo, *Memahami Islam Jawa*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.
- [23] H. Muhammad, *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan*. Bandung: Mizan, 2011.
- [24] I. Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikri, 1999.
- [25] G. Barton, *Biografi Gus Dur : The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

- [26] A. Taufiq, "Pemikiran Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari : Studi Atas Karya Tulis KH. Hasyim Asy'ari Terkait Dengan Pendidikan," *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, vol. 11, no. 1, 2013.
- [27] D. Rahardjo, "Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren," in *Pergulatan Dunia Pesantren*, Jakarta: P3M, 1985.
- [28] "Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat." [Online]. Available: www.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Pengembangan_Pesantren_dan_Masyarakat. [Accessed: 06-Aug-2016].
- [29] S. Suyata, *Pesantren Sebagai Lembaga Sosial yang Hidup, dalam Dawam Rahardjo, Pergulatan Dunia Pesantren*. Jakarta: P3M, 1985.
- [30] A. Sunyoto, *Atlas Wali Songo : Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah*. Depok: Pustaka Iman, 2014.
- [31] R. A. Lukens-Bull, *Jihad Ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- [32] H. Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987.
- [33] J. Ohoitimur, "Disrupsi : Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi," *RESPONS Jurnal PPE-UNIKA ATMAJAYA*, vol. 23, no. 2, 2018.
- [34] A. H. Dasuki, "The Pondok Pesantren : an Account of Its Development in Independent Indonesia (1965-73)," Master Thesis, McGill University, Montreal, 1974.
- [35] H. F. Zarkasyi, "Modern Pondok Pesantren : Maintaining Tradition in Modern System," *Tsaqafah : Jurnal Peradaban Islam*, vol. 11, no. 2, 2015.
- [36] N. Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Dian Rakyat, t.th.

